

TO PROMOTE:

Membaca

Perkembangan Wacana
Hak Asasi Manusia
di Indonesia

Kata Pengantar:
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

To Promote:
**Membaca Perkembangan Wacana
Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta

|

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Eko Riyadi (editor)

*To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi
Manusia di Indonesia*
Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012

14.8 cm x 21 cm

xii+ 580 hlm

ISBN : 978-979-18057-5-9

1. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia
di Indonesia*

I. Judul

Proofreader : Syarif Nurhidayat & Sumiardi

Desain sampul : Terra Bajraghosa

Tata letak : Abrar

Cetakan Pertama, September 2012

Penerbit:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 452032/452158

E-mail: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pushamuii.org

Bekerjasama dengan

Norwegian Center for Human Rights (NCHR)

Universitas Oslo, Norwegia

PASANG SURUT PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Nurhasan¹

A. Pendahuluan

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan istilah Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan hak dasar (*fundamental rights*) yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan yang dilindungi atau dijamin oleh hukum, seperti hak untuk hidup (*the right to life*), kebebasan (*freedom*), dan keadilan (*equity*). Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia merupakan hubungan sebab akibat (*causality*), artinya hak asasi manusia hanya dapat tegak dalam negara demokrasi, dan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hanya dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketiadaan salah satu di antaranya dapat meniadakan yang lainnya.

Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi hak asasi manusia di dunia maupun termasuk di Indonesia mengalami masa pasang surut, kondisional dan situasional, karena sangat bergantung pada selera penguasa yang pada masanya sedang berkuasa. Biasanya, demokrasi akan tumbuh dengan pesat ketika rakyat mengalami bencana kemanusiaan yang dahsyat, sehingga rakyat sadar untuk menggugat hak-hak dasarnya. Demikian pula, penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak

¹ Nurhasan, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat.

asasi manusia akan tumbuh dengan pesat ketika pemimpin murni pilihan rakyat berkuasa menggantikan penguasa otoriter dan/atau diktator. Pada konteks ini, pertumbuhan dan perkembangan demokrasi biasanya seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan hak asasi manusia.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia serta hubungan antara keduanya.

B. Sejarah Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia

Embrio demokrasi di bumi nusantara ditancapkan melalui gerakan pemuda yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang kemudian diikuti dengan lahirnya organisasi-organisasi serupa dengan satu tujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Era kebangkitan nasionalisme Indonesia tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pribumi sudah tidak sudi lagi dipimpin oleh pemerintahan kolonial Belanda. Para pemuda sadar bahwa penjajah telah merampas hak-hak dasar (*fundamental rights*) masyarakat Pribumi. Penjajahan ternyata hanya melahirkan bencana kemanusiaan dan penderitaan lahir batin yang tiada tara. Momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 mengekspresikan dengan jelas cita-cita para pemuda untuk menyatukan semua potensi kekuatan bangsa dalam mewujudkan sebuah bangunan negara yang merdeka, adil dan makmur. Para pemuda ingin membangun demokrasi di tanah airnya sendiri tanpa campur tangan pihak asing, yaitu dari rakyat (*from the people*), untuk rakyat (*for the people*), dan oleh rakyat (*by the people*). Pintu gerbang untuk mewujudkan cita-cita tersebut terbuka melalui proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

(1) Periode Tahun 1945 Hingga 1959

Tegaknya demokrasi ditunjang oleh banyak faktor, diantaranya adalah adanya jaminan kebebasan berorganisasi, berpendapat, berekspresi, beragama, pers, dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya yang diperlukan untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Nilai-nilai demokrasi sangat mewarnai proses pendirian Negara Indonesia. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengekspresikan gugatan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kembali hak atas kemerdekaan (kebebasan) sebagai pembuka jalan untuk meraih kebebasan-kebebasan dasar lainnya. Dengan alasan apapun, kekuatan asing tidak berhak memerintah bangsa ini sebagaimana halnya bangsa ini tidak berhak memerintah bangsa lainnya. Bangsa Indonesia sepenuhnya berhak menentukan nasibnya sendiri.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung rumusan Pancasila sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung falsafah kebebasan beragama. Aspirasi umat Islam dan umat beragama lainnya cukup terakomodasi dengan rumusan tersebut. Khusus bagi umat Islam, rumusan sila pertama tersebut diilhami sepenuhnya oleh konsep *tauhid* karena seandainya mayoritas rakyat Indonesia bukan pemeluk agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa Pancasila tidak akan mengenal sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung falsafah hak asasi manusia sebagai modal dasar untuk tegaknya demokrasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung falsafah persamaan derajat dan kedudukan semua komponen pembentuk bangsa ini. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan mengandung falsafah demokrasi perwakilan yang dalam kenyataannya diwujudkan dalam bentuk adanya lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung falsafah demokrasi ekonomi bahwa hasil-hasil pembangunan harus dapat

dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Euphoria demokrasi pada tahun pertama berdirinya Negara Indonesia tercermin dari antusiasnya masyarakat menyambut adanya jaminan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUD 1945 dan adanya manifesto politik (maklumat) Wakil Presiden Hatta tanggal 1 November 1945 tentang pemberlakuan sistem multi partai.

Sistem multi partai memberi peluang kepada segenap komponen bangsa untuk mendirikan partai politik, dan tidak ketinggalan umat Islam merespon positif peluang tersebut. Pada tanggal 7-8 November 1945, melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta terbentuk sebuah partai politik Islam dengan nama MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (kolektif) seperti NU dan Muhammadiyah. Di dalam Anggaran Dasarnya,² tujuan partai ini yaitu terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Ilahi. Lebih jauh tujuan tersebut dijelaskan dalam Tafsiran Anggaran Dasarnya, yaitu menuju kepada *Baldatun thoyibatun wa rabbun ghofur* (negara yang berkeadilan diliputi keampunan Ilahi), dimana negara melakukan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih; dimana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, *tasamuh* (lapang dada), keadilan sosial sebagai yang diajarkan Islam, terlaksana sepenuhnya; dimana kaum muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur perikehidupan pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Islam sebagai yang tercantum di dalam Qur'an

² Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 113-114.

dan Sunnah; dimana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk menganut dan mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya; dimana bagi seluruh penduduknya dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman; terjamin baginya hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan kesusilaan.

Disebutnya secara tegas dan jelas prinsip musyawarah, kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dalam Tafsir Anggaran Dasar partai Masyumi menunjukkan bahwa partai ini sejak awal berdirinya adalah partai pembela demokrasi dan hak asasi manusia, baik dalam teori maupun praktik. Pemimpin-pemimpin partai ini menafsirkan konsep *syura* dalam Al-Qur'an dengan demokrasi parlementer.

Pada periode 1945 hingga 1959, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia bukan berarti tanpa cacat. Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 secara mengejutkan menikam bangsa Indonesia dari belakang, yaitu dengan melakukan pemberontakan bersenjata di Madiun Jawa Timur dan juga di daerah-daerah lainnya. Ribuan jiwa rakyat tidak berdosa tewas dalam tragedi kemanusiaan tersebut.

Manifesto politik Wakil Presiden Hatta berperan besar dalam melahirkan puluhan partai pada periode ini. Beragam partai politik, baik bercorak agama seperti Masyumi, bercorak nasionalis seperti PNI, bercorak komunis seperti PKI, dan lain-lain tumbuh dengan subur. Tidak kurang dari 28 partai politik turut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (dari partai Masyumi). Pemilu 1955 merefleksikan pesta demokrasi bangsa Indonesia yang embrionya mulai digelorakan tahun 1908 dan pintu gerbangnya terbuka tahun 1945.

Pemilu 1955 menghasilkan Kabinet Ali Sastroamidjojo - M. Roem - Idham Cholid (PNI-Masyumi-NU). Komposisi kabinet tersebut memperlihatkan bahwa dalam Pemilu 1955 tidak ada satu partai pun yang menang mutlak. Kondisi demikian ternyata mengakibatkan kabinet ini tidak berumur panjang (Maret 1956-Maret 1957). Faktor penyebabnya terutama karena partai-partai hanya memperjuangkan kepentingan golongannya masing-masing. Mereka telah melupakan amanat demokrasi mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Hingga tahap ini, bangsa Indonesia baru mampu melaksanakan hakekat demokrasi yang pertama yaitu: dari rakyat (*from the people*). Memilih pemimpin yang berasal "dari rakyat" Indonesia sendiri telah dilaksanakan dengan baik melalui Pemilu 1955. Namun dalam hal menunaikan kewajiban mempersembahkan hasil-hasil pembangunan "untuk rakyat" (*for the people*) dapat dikatakan mengalami kegagalan. Demikian pula dengan konsep pembangunan negara yang menempatkan rakyat sebagai pelaku pembangunan (*by the people*) masih berupa angan-angan, karena sekedar untuk menyusun konsep UUD dan GBHN saja ternyata kabinet tersebut tidak mampu menuntaskannya.

Jatuhnya Kabinet Ali-Roem-Idham pada bulan Maret 1957 sekaligus sebagai pertanda mulai surutnya perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Penerapan demokrasi parlementer di Indonesia mengalami kegagalan. Secara perlahan, kedaulatan rakyat (inti demokrasi) mulai digerogeti dan diambil alih oleh Presiden Soekarno. Sebagai dasar pembenarnya, Presiden Soekarno meluncurkan konsep Demokrasi Terpimpin. Tindakan pertama untuk mengukuhkan kekuasaannya, ia mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan alasan apapun, Dekrit Presiden 1959 merupakan tindakan anti demokrasi dan hak asasi manusia.

(2) Periode 1959 hingga 1965

Pada periode ini, kekuatan-kekuatan politik Indonesia mengubah strategi perjuangannya dari politik praktis menjadi perjuangan ideologi tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante Republik Indonesia. Ideologi besar yang muncul dalam Majelis Konstituante ada tiga, yaitu: Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Pertentangan ideologi mencapai puncaknya ketika Presiden Soekarno menggunakan kekuasaannya membubarkan Majelis Konstituante pada bulan Juli 1959 dan memaksa membubarkan Partai Masyumi pada bulan Desember 1960. Setelah peristiwa tersebut, hari-hari berikutnya hingga tahun 1965 dapat dikatakan di Indonesia sudah tidak ada lagi demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, ketika demokrasi lenyap maka hak asasi manusia pun akan ikut lenyap pula.

Beragam pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia terjadi pada periode ini, dari mulai pengukuhan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, mematikan peran dan fungsi MPR dan DPR, membubarkan partai politik yang tidak sejalan dengan Presiden, memelihara PKI hingga tumbuh besar dan kuat yang visi dan misinya nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, tidak menyelenggarakan pemilu, tidak berusaha mensejahterakan rakyat, tidak melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan lain-lain yang kemudian mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI yang menewaskan tujuh Jenderal dan ribuan rakyat tak berdosa lainnya.

Sejalan dengan *Circle Theory* (Teori Roda Berputar), ketika terjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat, maka rakyat tertindas akan bangkit melawan penguasa otoriter dan/atau diktator untuk membangun kembali demokrasi dan hak asasi manusia yang hakiki. Kekuatan rakyat (*people power*) menggelora dan bangkit pada tahun 1966 yang kemudian

melahirkan rezim Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama.

(3) Periode 1966 hingga 1998

Pada tahun 1966, mahasiswa dan pemuda dari berbagai elemen bangsa ini tampil ke depan mewakili rakyat menggugat pemerintah yang sedang berkuasa supaya mengelola negara secara demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Aksi mahasiswa dan pemuda dalam perkembangannya mampu mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) kepada Soeharto. Intisari Supersemar yaitu memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting dalam upaya memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan penting yang dilakukan oleh Soeharto sebagai pemegang Super-semar yaitu membubarkan PKI (salah satu tuntutan rakyat dalam Tri Tura) karena partai tersebut selalu berusaha membunuh demokrasi dan hak asasi manusia. Langkah simpatik tersebut disambut baik oleh segenap rakyat Indonesia dan kemudian mengantarkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto selama lebih kurang 32 tahun, tidak dapat disangkal dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ia berprestasi besar dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Namun, prestasi Presiden Soeharto di bidang demokrasi dan hak asasi manusia tidak terlalu menggembirakan. Penegakan demokrasi dan hak asasi manusia kurang ia perhatikan. Ia lebih suka hanya membangun simbol-simbol demokrasi, tetapi mengesampingkan hakekatnya.

Simbol-simbol demokrasi yang disuguhkan kepada rakyat misalnya menyelenggarakan Pemilu. Pada masa pemerintahannya, ia mampu menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali, tetapi pemilu yang diselenggarakannya penuh dengan tindakan-tindakan rekayasa dan hanya ditujukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Lembaga-lembaga

kenegaraan seperti MPR dan DPR memang ada dan seluruh kursi yang tersedia selalu terisi penuh, namun orang-orang yang menduduki kursi-kursi tersebut sebagian besarnya terdiri dari orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Presiden. MPR, DPR dan bahkan DPA menjadi mandul karena Presiden tidak memerlukan lagi saran dan kritik. Orang yang berani berbeda pendapat dengan Presiden akan dianggap sebagai lawan dan ancaman bagi kekuasaannya sehingga bila perlu dilenyapkan dari lingkaran kekuasaan. Situasi demikian sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton³ bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan itu cenderung bersalah guna, sedangkan kekuasaan yang mutlak bersalah guna secara mutlak pula).

Penegakan demokrasi yang buruk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berimplikasi pada penegakan pemilu yang buruk pula. Terlampaui banyak kasus-kasus pelanggaran pemilu yang secara langsung atau tidak langsung sebabnya bersumber dari kebijakan Pemerintah. Akibat-akibat dari penerapan DOM di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur cukup mewakili citra buruk tersebut.

Pemerintahan Soeharto juga dinilai kurang responsif terhadap ketentuan-ketentuan internasional di bidang pemilu. Ratifikasi terhadap konvensi, kovenan, dan bentuk perjanjian internasional lainnya di bidang pemilu sangat lamban dilakukan.

Selain dari itu, cara menghadapi aksi-aksi mahasiswa dengan pendekatan militer juga banyak menyisakan adanya pelanggaran pemilu. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran secara nasional dan dijawab oleh Pemerintah dengan pendekatan militer, maka kerusuhan besar tidak terelakkan yang kemudian dapat memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

³ Lihat H.R. Sri Soemantri M, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 2.

(4) Periode 1998 hingga 2005

Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan ketika rakyat menjerit tertindas dan menderita, maka Tuhan pun tidak rela kemudian dengan kasih sayangnya memberi pertolongan melalui jiwa-jiwa muda para mahasiswa dan pemuda. Sejarah kembali mencatat prestasi besar mahasiswa dan pemuda dalam menegakan demokrasi dan pemilu untuk bangsa dan negaranya, ketika pada tahun 1998 berhasil menumbangkan rezim Orde Baru dan kemudian mengangkat penggantinya yang dikenal sebagai rejim Orde Reformasi.

Sumbangan besar Orde Reformasi bagi penegakan demokrasi dan pemilu di Indonesia dapat dicatat misalnya Amandemen UUD 1945. Jika Presiden Soekarno pernah melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan pemilu karena "tidak mau melaksanakan" UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sedangkan Presiden Soeharto justru karena terlalu kreatif sehingga "mengakali" UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Banyak hal dalam UUD 1945 yang perlu disempurnakan, baik menyangkut materi muatannya, sistematikanya, maupun redaksionalnya, sehingga kini UUD 1945 hasil Amandemen menjadi relatif lebih sulit untuk "diakali" oleh Presiden.

Amandemen pertama UUD 1945 terjadi pada tahun 1999, telah diubah 9 Pasal, yaitu: Pasal-pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan Pasal 21. Amandemen kedua UUD 1945 terjadi pada tahun 2000 dengan mengubah 9 Pasal, yaitu: Pasal-pasal 18, 19, 20, 25 (penambahan), 26, 27, 28, 30, dan Pasal 36. Pada perubahan kedua terjadi juga penambahan pasal, yaitu: Pasal 18A, 18B, 20A, 22A, 22B, 25E (baru), 28A sampai dengan 28J, 36A hingga Pasal 36C. Amandemen ketiga UUD 1945 terjadi pada tahun 2001, telah diubah pasal-pasal berikut yaitu: Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 23, Pasal 6, Pasal 7A (baru), Pasal 22C, 22D, 22E (baru), Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan Pasal 25. Amandemen keempat UUD 1945 terjadi pada tahun 2002. Kini, sedang ada upaya menyiapkan amandemen kelima UUD 1945.

Hal penting dari adanya amandemen UUD 1945 tersebut yang turut mendorong upaya penegakan demokrasi dan pemilu diantaranya (1) adanya pembatasan masa jabatan Presiden, dan Presiden beserta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; (2) adanya ketegasan tentang Indonesia sebagai negara hukum; (3) Kedudukan MPR dan DPR menjadi lebih kuat; (4) adanya lembaga DPD selain DPRD; (5) pengaturan HAM yang lebih tegas dan jelas; (6) kekuasaan kehakiman yang lebih mandiri; dan (7) pengaturan masalah pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial yang lebih jelas.

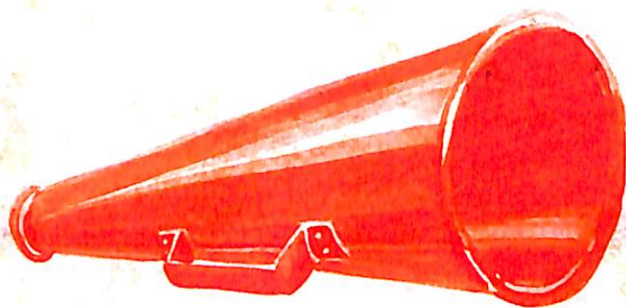
Kemajuan lainnya pada periode ini yaitu telah diatur dan telah dilaksanakannya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui Pemilu Presiden tahun 2004. Sistem ini telah sesuai dengan hakikat demokrasi yang ketiga yaitu memilih langsung pemimpin negara oleh rakyat (*by the people*). Lembaga kepresidenan menjadi tidak angker lagi, terbukti sejak bergulirnya era reformasi, Indonesia telah berganti Presiden sebanyak 4 kali yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan kini Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komitmen Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden SBY terhadap penegakan demokrasi dan pemilu relative cukup baik dan kuat.

C. Penutup

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan demokrasi dan pemilu di Indonesia mengalami masa pasang dan masa surut yang sangat ditentukan oleh karakter pemimpin bangsa dan negara yang pada saat itu sedang berkuasa dan karakter hukum terutama UUD yang pada saat itu sedang berlaku. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dan UUD yang terus menerus disempurnakan cenderung lebih baik bagi upaya peningkatan kualitas penegakan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam Dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Herbert Feit, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964.
- H.R. Sri Soemantri M, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-empat*, PSHTN FH-UI, Jakarta, 2002.
- Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution, 1945-1950*, Victoria: Longman, Hawthorn, 1974.



TO PROMOTE:

Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan dari serpihan ide konstruktif wacana konseptual hak asasi manusia. Buku ini berisi gugatan, analisis, kritik, ide solutif sekaligus afirmasi terhadap hak asasi manusia.

Terdapat tiga kategori naskah dalam buku ini yaitu (a) naskah mengenai hak asasi manusia, demokrasi dan konstitusi; (b) naskah mengenai hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya; dan (c) naskah mengenai perdebatan hak asasi manusia dalam kerangka Islam, atau sebaliknya isu-isu ke-Islam-an dalam kerangka hak asasi manusia.

Ditulis oleh 19 (sembilan belas) orang dosen pengajar hak asasi manusia pada berbagai universitas di Indonesia, buku ini wajib dibaca oleh semua orang yang ingin mengetahui perkembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia.

Diterbitkan atas kerjasama:



**UNIVERSITY
OF OSLO**

Norwegian Centre for Human Rights

ISBN 978-979-18057-5-9



978-979-18057-5-9